

JURNAL SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM REKLAMASI LAUT OLEH SINGAPURA TERHADAP
STATUS DAN FUNGSI SELAT MALAKA SEBAGAI SELAT
INTERNASIONAL**



Diajukan oleh :

ROBIN AZARYA

NPM	: 160512609
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum tentang Hubungan Internasional

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PENGESAHAN
JURNAL SKRIPSI
AKIBAT HUKUM REKLAMASI LAUT OLEH SINGAPURA TERHADAP
STATUS DAN FUNGSI SELAT MALAKA SEBAGAI SELAT
INTERNASIONAL .



Diajukan oleh :
ROBIN AZARYA

NPM : 160512609
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan
Internasional

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 2 Januari 2020
Dosen Pembimbing


Dr. Y. Triyana, S.H., M.Hum.



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta


Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

AKIBAT HUKUM REKLAMASI LAUT OLEH SINGAPURA TERHADAP STATUS DAN FUNGSI SELAT MALAKA SEBAGAI SELAT INTERNASIONAL

Robin Azarya

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

email: robinazarya98@mail.uajy.ac.id

Abstract

Singapore as a coastal state whose sea area is part of the Malacca Strait took a policy to expand its land area by conducting reclamation around the sea. However, the policy towards reclamation activities carried out by Singapore became one of the potential problems arising between Singapore and the Malacca Strait. This research analyzes how is the legal impact of the sea reclamation by Singapore on the status and function of the Malacca Strait as an international strait. This research uses normative legal approach. The datas collected through interviews and library, such as books, journals, and various other of legislations. From the data analyzes, the author uses the deductive method in drawing conclusions. Based on the research conducted, the author concluded that the reclamation activities carried out by Singapore didn't disrupt the sovereignty of other countries. However, if the reclamation activities are carried out massively and continuously, it will cause Singapore's land area to expand and the sea area to be narrower and shallower. This will certainly have an impact on the disruption of international shipping lines in the Malacca Strait.

Keywords: Legal Impact, Reclamation, Malacca Strait, International Strait

1. PENDAHULUAN

Sebagai selat internasional¹, Selat Malaka memegang peranan penting bagi jalur pelayaran dan perdagangan dunia. Dalam hal ini, Singapura sebagai negara pantai yang wilayah lautnya merupakan bagian dari selat Malaka mengambil kebijakan untuk memperluas wilayah daratannya dengan cara melakukan reklamasi di sekitar wilayah lautnya. Kebijakan terhadap kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh Singapura ini dapat menjadi salah satu potensi timbulnya permasalahan dikarenakan kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh Singapura secara berkesinambungan dapat berimplikasi terhadap status dan fungsi selat Malaka sebagai selat internasional.²

Apabila kebijakan reklamasi yang dilakukan Singapura terus dilakukan tanpa memperhatikan aspek lain, maka hal ini akan berdampak pada berkurangnya fungsi selat Malaka sebagai jalur pelayaran internasional.³ Oleh karena itu, negara yang berbatasan langsung dengan selat tidak boleh menghambat jalur pelayaran dan harus mengumumkan setiap saat adanya bahaya yang mungkin timbul terhadap jalur pelayaran di dalam atau di atas selat yang diketahuinya.⁴

Pada prinsipnya, kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh Singapura memang tidak

wilayah yang dilakukan secara sengaja oleh negara tertentu dengan melakukan pengurukan wilayah.

³ Rosiana Haryanti, 2019, "Menyoal Istilah Pantai dan Pulau Reklamasi" dalam <https://properti.kompas.com/read/2019/06/24/180540521/menyoal-istilah-pantai-dan-pulau-reklamasi?page=all> diakses 27 Agustus 2019 pukul 23.03 WIB.

⁴ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Yogyakarta, hlm. 81 diakses 29 Agustus 2019 pukul 08.55 WIB.

¹ Selat Internasional menurut Pasal 37 *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS 1982) adalah selat yang digunakan dalam pelayaran internasional di antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dan bagian laut lepas atau suatu zona ekonomi eksklusif lainnya.

² Yang dimaksud dengan reklamasi adalah suatu proses kegiatan untuk memperluas suatu

mengganggu wilayah kedaulatan negara lain. Namun, jika kegiatan reklamasi tersebut dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan akan mengakibatkan wilayah daratan Singapura semakin luas dan wilayah lautnya semakin sempit dan dangkal. Hal ini tentunya akan berdampak pada terganggunya jalur pelayaran internasional di Selat Malaka. Selain itu, adanya kegiatan reklamasi yang dilakukan secara masif juga akan mempengaruhi ekosistem dan keanekaragaman hayati bawah laut, sehingga mereka yang habitatnya disana harus bermigrasi dan mencari tempat tinggal lain.

2. METODE

- a. Jenis Penelitian yang digunakan dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan tentang akibat hukum reklamasi laut oleh Singapura terhadap status dan fungsi selat Malaka sebagai selat internasional.
- b. Sumber data dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian dan internet.
- c. Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai dengan 5 (lima) tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu: deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, inteprestasi hukum positif, dan menilai hukum positif.
- d. Proses berpikir dalam penarikan kesimpulan menggunakan proses berpikir secara deduktif, yaitu proses berpikir yang berawal dari proposisi umum kemudian berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

e. Metode Pengumpulan Data dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini menggunakan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari Bapak Khairul Azman Bin Rahmat selaku *First Secretary (Political)* Kedutaan Besar Singapura di Indonesia dan Ibu Dahlia Sihombing selaku *Reference Assistant* dari *United Nations Information Centre* (UNIC). Selain itu, metode pengumpulan data dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini juga dilakukan dengan menggunakan metode wawancara yang diperoleh dari Bapak Halid K. Jusuf selaku Kepala Subdirektorat Pengawasan Jasa Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Bapak Darma Adiasa Saragih selaku Kepala Seksi Pengawasan Produk Kelautan KKP, dan Bapak Frista Yorhanita selaku Kepala Subdirektorat Reklamasi KKP.

3. PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum tentang Status Selat Internasional Menurut UNCLOS 1982

1) Sejarah Perkembangan Hukum Laut Internasional

Berdasarkan sejarah hukum laut internasional, terdapat beberapa teori mengenai hukum laut internasional salah satunya adalah teori yang dikemukakan oleh Bartorus dan Baldus. Teori yang dikemukakan oleh Bartolus menekankan pada dasar pembagian dua wilayah laut, sedangkan teori yang dikemukakan oleh Baldus menekankan pada perbedaan terhadap tiga konsepsi laut.⁵ Pada abad ke- 17, muncul dua

⁵ Teori Baldus dalam Muhammad Nasir, 2013, Pentingnya Pembentukan Undang-Undang Lintas Transit di Selat Malaka Bagi Indonesia dan Malaysia dalam *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 42, Nomor 4, Oktober 2013, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe Aceh, hlm. 475.

doktrin di bidang hukum laut internasional, yaitu ajaran *mare liberum* yang menegaskan bahwa laut dapat dimiliki oleh siapapun, dan ajaran *mare clausum*, yaitu ajaran yang mengatakan bahwa laut tidak dapat dimiliki.⁶

Dalam sejarah hukum laut internasional juga mengenal pertarungan antara dua konsepsi pokok, yaitu teori Res Nullius yang menyatakan bahwa laut tidak ada yang memilikinya, sehingga dapat diambil oleh masing-masing negara dan teori Res Communis yang menyatakan bahwa laut adalah milik masyarakat dunia, sehingga tidak dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara.⁷

Perkembangan mengenai pengaturan hukum laut internasional diperkuat dengan adanya Konferensi Hukum Laut pertama yang kemudian menghasilkan suatu konvensi yang dikenal dengan Konvensi Jenewa 1958. Adanya Konvensi Jenewa 1958 ini dirasa belum cukup untuk mengatur segala hal mengenai pengaturan dan wilayah laut dalam lingkup internasional. Oleh karena itu, dibentuklah suatu pengaturan mengenai perkembangan hukum laut yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 atau yang disebut dengan UNCLOS.⁸

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, 1978, *Hukum Laut Internasional*, Binacipta, Bandung, hlm. 12 diakses 11 September 2019 pukul 17.53 WIB.

⁷ Hasjim Djalal, 1979, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Cetakan Pertama, Penerbit Binacipta, Bandung, hlm. 11 diakses 30 Agustus 2019 pukul 16.42 WIB.

⁸ Shun Kwang, "Perkembangan Hukum Laut Internasional" dalam https://www.academia.edu/7379620/Perkembangan_Hukum_Laut_Internasional diakses 2 November 2019 pukul 22.54 WIB.

2) Status Selat Internasional Menurut UNCLOS 1982

Berkenaan dengan status hukum dari perairan laut serta dasar laut dan tanah di bawahnya, pada prinsipnya sama seperti status hukum dari perairan laut pada umumnya, yaitu sebagai bagian dari laut teritorial dari negara yang daratannya mengapit pada kedua sisi dari selat tersebut atau sebagai laut teritorial dari negara-negara yang mengapitnya, jika lebar laut dari selat itu habis terbagi menjadi laut teritorial setiap negara tersebut. Apabila perairan laut dari selat yang diapit oleh dua atau lebih negara tersebut masih ada yang tersisa, maka status hukumnya adalah tetap dikategorisasikan sebagai wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), meskipun lebar ZEE tersebut lebih sempit dari lebar laut teritorial dua atau lebih negara yang mengapitnya.⁹

B. Tinjauan Umum tentang Hak Negara Untuk Melakukan Reklamasi di Wilayah Lautnya

1) Pengertian Negara dan Batas Wilayah

Sebagaimana yang dimaksud dalam *Article 1 Montevideo Convention on Rights and Duties of States* 1933 menyatakan bahwa pada prinsipnya negara sebagai subyek hukum internasional harus memiliki karakteristik dan telah memenuhi keempat syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, diantaranya yaitu memiliki penduduk yang tetap, kepemilikan atas wilayah tertentu, pemerintah, dan

⁹ Steven Yohanes Pailah, 2008, *Pengelolaan Isu-Isu Keamanan di Selat Malaka Periode 2005-2006*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 82 diakses 11 September 2019 pukul 20.53 WIB.

memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan negara-negara lain.¹⁰

Menurut Aan Kurnia dalam bukunya yang berjudul “*Between Threats and Opportunities: Di Antara Ancaman dan Peluang*” menyatakan bahwa batas wilayah negara adalah garis batas yang digunakan sebagai pemisah terhadap kedaulatan suatu negara yang didasarkan pada Hukum Internasional.¹¹

2) Hak Negara untuk Melakukan Reklamasi di Wilayah Lautnya

Pada prinsipnya, negara pantai mempunyai hak untuk melakukan reklamasi maupun melakukan pembangunan di sekitar wilayah lautnya termasuk di wilayah selat internasional. Namun, dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut tidak boleh dilaksanakan secara sewenang-wenang dan tidak boleh mengganggu kedamaian, serta harus menghormati hak lintas transit bagi kapal-kapal asing.¹²

3) Macam-Macam Hak Lintas Menurut UNCLOS 1982

a) Hak Lintas Damai (*The Right of Innocent Passage*)

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 UNCLOS 1982 menyatakan

bahwa lintas damai (*innocent passage*) adalah kebebasan bernavigasi bagi kapal asing untuk melewati wilayah laut negara lain secara damai sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban atau keamanan negara pantai.¹³

b) Hak Lintas Transit (*The Right of Transit Passage*)

Pengaturan mengenai hak lintas transit telah diatur dalam Pasal 34-45 UNCLOS. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 UNCLOS menyatakan bahwa hak lintas transit adalah pelaksanaan kebebasan pelayaran dan penerbangan semata-mata dikhususkan untuk tujuan transit yang terus-menerus, langsung, dan secepat mungkin antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dan bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif lainnya.¹⁴

c) Hak Lintas Alur Kepulauan (*The Right of Archipelagic Sea Lane Passage*)

Lintas alur kepulauan dapat diartikan sebagai suatu pelaksanaan hak pelayaran dan penerbangan yang semata-mata digunakan untuk melakukan transit yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dan bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif lainnya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (3).¹⁵

¹⁰ Cosmopolitikos.com, 2008, *Montevideo Convention On Rights and Duties of States* dalam <http://krd-blog.de/wp-content/uploads/2015/01/montevideo.pdf> diakses 31 Oktober 2019 pukul 01.10 WIB.

¹¹ Aan Kurnia, 2017, “*Between Threats and Opportunities: Di Antara Ancaman dan Peluang*”, Epicentrum Walk 7th Floor B-717, Jakarta, hlm. 319 diakses 29 Agustus 2019 pukul 18.36 WIB.

¹² Pasal 44 *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982.

¹³ *Ibid*, Pasal 19.

¹⁴ *Ibid*, Pasal 38.

¹⁵ *Ibid*, Pasal 53 ayat (3).

4) Kebijakan Reklamasi di Singapura

Pemerintah Singapura memulai kebijakan reklamasi pada tahun 1966. Namun, pada kenyataannya kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh Singapura sudah terjadi pada masa kolonial. Salah satu proyek reklamasi terbesar pasca kemerdekaan pertama adalah kegiatan reklamasi di sekitar wilayah Pantai Timur. Adanya reklamasi ini berdampak pada bertambahnya luas wilayah di sepanjang pantai tenggara pulau tersebut seluas 1.525 hektar, sehingga kegiatan reklamasi ini sering disebut sebagai “*The Greatest Reclamation*” yang dilakukan oleh *Housing and Development Board* (HDB).¹⁶

Kegiatan reklamasi di sekitar wilayah Pantai Timur dimulai secara resmi pada tahun 1966 dan akan berlanjut selama 30 tahun selama tujuh tahap. Situs yang diusulkan untuk reklamasi pertama kali digunakan untuk menentukan kondisi dasar laut, ketersediaan bahan pengisi, serta bentuk dan penyesuaian area reklamasi. Dalam hal ini, Singapura telah mengembangkan teknologi baru untuk mencoba mengurangi jumlah pasir yang dibutuhkan dalam proyek reklamasi dengan cara

mengembangkan metode yang disebut “*empoldering*.”¹⁷

C. Analisis Akibat Hukum Reklamasi Laut oleh Singapura Terhadap Status dan Fungsi Selat Malaka sebagai Selat Internasional

Kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh Singapura berawal pada tahun 1966 dan akan berlanjut hingga tahun 2030, dimana pada saat itu luas wilayah daratannya hanya sekitar 578 kilometer persegi. Kebijakan reklamasi ini menyebabkan luas wilayah negaranya bertambah secara signifikan menjadi seluas 719 kilometer persegi.¹⁸

Meskipun tidak diatur secara spesifik dalam UNCLOS, kebijakan reklamasi yang dilakukan oleh Singapura ini tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang tanpa memperhatikan kondisi wilayah dan yurisdiksi dari negara lain. Dalam hal ini, Pemerintah Singapura telah membuat yurisdiksi nasionalnya sendiri dengan mengeluarkan *statuta* tentang reklamasi yang telah diatur dalam *Chapter 113 Foreshores Act* yang telah disahkan pada tanggal 30 Maret 1987.¹⁹

¹⁶ Yang dimaksud dengan *Housing and Development Board* atau yang selanjutnya disingkat dengan HDB adalah dewan di bawah Kementerian Pembangunan Nasional yang bertanggung jawab untuk pembangunan perumahan kepada masyarakat di Singapura. Secara umum hal ini bertujuan untuk merelokasi pemukiman liar dan kumuh pada tahun 1960-an dan memukimkan kembali untuk menempati perumahan murah buatan negara yang lebih layak, dalam <https://www.hdb.gov.sg/cs/infoweb/homepage> diakses 25 Oktober 2019 pukul 01.04 WIB.

¹⁷ Lim Tin Seng, 2017, “*Land From Sand: Singapore’s Reclamation Story*” dalam <http://www.nlb.gov.sg/biblioasia/2017/04/04/land-from-sand-singapores-reclamation-story/> diakses 26 Oktober 2019 pukul 15.30 WIB.

¹⁸ Lily Rusna Fajriah, 2017, “*Singapura Bisa Jadi Contoh Kesuksesan Reklamasi*” dalam <https://ekbis.sindonews.com/read/1198055/34/singapura-bisa-jadi-contoh-kesuksesan-reklamasi-1492496232> diakses 17 Oktober 2019 pukul 22.01 WIB.

¹⁹ Data diperoleh dari *First Secretary (Political)* Khairun Azman Bin Rahmat dalam <https://sso.agc.gov.sg/Act/FA1872?ViewType=Advances&Phrase=Land+reclamation&WiAl=1> pada tanggal 17 Oktober 2019 pukul 20.35 WIB.

Berdasarkan sejarahnya, reklamasi yang dilakukan oleh Singapura pernah berdampak dan merugikan negara lain, salah satunya Indonesia. Reklamasi yang dilakukan Singapura ternyata dilakukan dengan cara mengimpor pasir dari Riau dalam kurun waktu 24 tahun, yang dimulai sejak tahun 1978 hingga 2002. Akibat mengambil pasir dari daratan Indonesia, luas wilayah Singapura maju sejauh 12 km ke arah perbatasan Indonesia mendekati pulau terluar, yaitu Pulau Nipah. Hal ini menjadikan perairan di pulau tersebut mengalami kenaikan yang menyisakan daratan beberapa meter dari permukaan laut.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subdirektorat Pengawasan Jasa Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Halid K. Jusuf menyatakan bahwa persentase luas daratan Singapura yang telah direklamasi mencapai sekitar 16-20% dari total luas wilayah daratannya. Berdasarkan data ekspor pasir laut dari Indonesia ke Singapura menunjukkan bahwa ekspor pasir laut paling banyak berasal dari Kepulauan Riau. Mengingat akan hal tersebut, pada tahun 2002 Indonesia menerapkan kebijakan moratorium (pemberhentian sementara) atas ekspor pasir laut ke Singapura dengan tujuan untuk membatasi proyek reklamasi Singapura.²¹

²⁰ Kantor Berita Politik Republik Merdeka, 2018, "Menyoroti Reklamasi, Singapura Makin Kaya, Indonesia Makin Sengsara" dalam <https://dunia.rmol.id/read/2018/11/26/368086/menyoroti-reklamasi-singapura-makin-kaya-indonesia-makin-sengsara> diakses 17 Oktober 2019 pukul 22.15 WIB.

²¹ Hasil wawancara dengan Kepala Subdirektorat Pengawasan Jasa Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Halid K. Jusuf pada tanggal 8 November 2019 pukul 15.26 WIB.

Kepala Subdirektorat Reklamasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Frista Yorhanita menambahkan bahwa hingga tahun 2002 pengambilan pasir di laut dan pulau terutama pada Provinsi Riau (saat ini telah menjadi Provinsi Kepulauan Riau) dan Provinsi Bangka Belitung marak dan tidak terkendali akibat permintaan pasir dari Singapura dalam jumlah yang besar. Berkenaan dengan hal tersebut, maka diterbitkanlah Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengendalian Penambangan Pasir Laut untuk melakukan penataan ulang regulasi tambang pasir di laut dan pulau.²²

Menurut Kepala Seksi Pengawasan Produk Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Darma Adiasa Saragih menyatakan bahwa reklamasi terjadi karena ada target lokasi penampung dan sumber material berupa pasir laut yang nantinya akan dipindahkan ke daerah reklamasi. Pengambilan sumber material reklamasi secara terus-menerus juga dapat berdampak pada perubahan oseanografi atau hidrodinamika air.²³

Singapura adalah salah satu negara anggota yang tergabung dalam *Convention on International Maritime Organization* (Konvensi IMO) 1948 dan telah melakukan *acceptation* pada tanggal 18 Februari 1966. Dengan adanya *acceptation* terhadap Konvensi IMO, maka Singapura

²² Hasil wawancara dengan Kepala Subdirektorat Reklamasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Frista Yorhanita pada tanggal 15 November 2019 pukul 16.44 WIB.

²³ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan Produk Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Darma Adiasa Saragih pada tanggal 14 November 2019 pukul 01.55 WIB.

harus menghormati dan tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam konvensi tersebut.²⁴

Berdasarkan putusan *International Tribunal For The Law of The Sea* (ITLOS) terkait sengketa tentang reklamasi antara Malaysia dengan Singapura pada tahun 2003 menyatakan bahwa pada prinsipnya setiap negara berhak untuk mengeksplorasi wilayahnya semaksimal mungkin, meskipun berpotongan atau bersinggungan langsung dengan wilayah selat internasional.

Karena merasa dirugikan dengan kebijakan reklamasi yang dilakukan oleh Singapura, pemerintah Malaysia mengajukan keberatan kepada ITLOS dengan meminta adanya tindakan provisional dari Singapura, namun ITLOS menolak permohonan tersebut dan tidak memberikan sanksi atau konsekuensi hukum kepada Singapura dikarenakan pada prinsipnya Singapura tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan karena reklamasi yang dilakukannya masih dalam batas wilayah kedaulatan Singapura.²⁵

Putusan ITLOS meminta dan menghimbau kepada Singapura agar dalam pelaksanaannya ke depan tidak

melakukan kerusakan yang telah ditimbulkan atau disebabkan sebelumnya, serta harus memberikan seluruh informasi terkait kegiatan reklamasi yang dilakukan kepada Malaysia.²⁶

Pemerintah Indonesia, Singapura, dan Malaysia telah melakukan perundingan dengan Pemerintah Jepang di Jakarta pada tanggal 10 Maret 1978 dan membentuk suatu nota kesepahaman dengan maksud untuk mengadakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia, Singapura, dan Malaysia dalam melakukan survei hidrografi dengan cara mendirikan dan menandai saluran navigasi sedalam 23 meter di jalur sebelah timur wilayah perairan selat Malaka.²⁷

Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia, Singapura, dan Malaysia juga telah membuat nota kesepahaman dengan asosiasi Non-Pemerintah Jepang mengenai pendirian dan pengoperasian perputaran dana dengan memberikan kontribusi berupa uang sejumlah 400 juta yen dengan maksud agar Pemerintah Indonesia, Singapura, dan Malaysia dapat bekerjasama dalam mengambil tindakan sesegera mungkin untuk mengurangi pencemaran minyak yang berasal dari kapal-kapal asing yang melewati wilayah selat Malaka.²⁸

²⁴ International Maritime Organization, "Convention on The International Maritime Organizations" dalam

<http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/Convention-on-the-International-Maritime-Organization.aspx> diakses 19 Oktober 2019 pukul 17.17 WIB.

²⁵ *International Tribunal for The Law of The Sea*, Case No. 12: "Case Concerning Land Reclamation by Singapore In and Around the Straits of Johor (Malaysia v. Singapore), Provisional Measures" dalam <https://www.itlos.org/cases/list-of-cases/case-no-12/#c390> diakses 22 Oktober 2019 pukul 14.18 WIB.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Memorandum of Understanding Regarding A Joint Hydrographic Survey And The Establishment And Marking of A 23-Meter Depth Navigable Channel At The One-Fathom Bank Area In The Straits of Malacca and Singapore, 1978 dalam <https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=TRI-1978-0006.pdf> diakses 13 November 2019 pukul 13.09 WIB.

²⁸ Memorandum of Understanding Between The Governments of Indonesia, Malaysia, and

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan reklamasi yang dilakukan oleh Singapura diperbolehkan selama hal itu dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan menurut Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS), yurisprudensi, maupun statuta nasional Pemerintah Singapura. Meskipun reklamasi diperbolehkan, bukan berarti kebijakan reklamasi tersebut dapat dilakukan secara sewenang-wenang, sehingga harus ada batasan-batasan yang jelas mengenai sejauh mana reklamasi itu diperbolehkan.

Adanya reklamasi yang dilakukan secara masif dan terus-menerus oleh Singapura dapat menjadi salah satu pemicu timbulnya potensi masalah yang berimbas pada status dan fungsi selat Malaka sebagai selat internasional. Hal ini dikarenakan reklamasi yang dilakukan oleh Singapura secara masif dikhawatirkan akan mengganggu hak lintas dan kebebasan berlayar bagi kapal-kapal asing. Apabila hak lintas kapal-kapal asing menjadi terganggu, maka mereka dapat menuntut haknya karena pada prinsipnya tidak boleh ada penangguhan terhadap hak lintas transit sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 44 UNCLOS.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan atas hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka terdapat beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan oleh penulis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perlu adanya pengaturan secara spesifik dan lebih mendalam yang

Singapore on The One Part and The Malacca Strait Council For And On Behalf Of The Japanese Non Governmental Associations On The Other Part For The Establishment and Operation Of A Revolving Fund to Combat Oil Pollution From Ships In The Straits of Malacca and Singapore, 1981 dalam <https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=TRI-1981-0008.pdf> diakses 13 November 2019 pukul 13.06 WIB.

mengatur tentang kebijakan reklamasi dalam lingkup internasional.

2. Harus ada perjanjian mengenai perbatasan wilayah antara negara yang melakukan reklamasi dengan negara yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara yang akan melakukan reklamasi.
3. Perlu adanya pembaharuan terhadap peraturan atau regulasi yang mengatur tentang reklamasi.
4. Perlu adanya penekanan secara tegas terhadap batasan-batasan yang jelas mengenai sejauh mana kegiatan reklamasi tersebut diperbolehkan atau tidak.

5. REFERENSI

BUKU

Aan Kurnia, 2017, *“Between Threats and Opportunities: Di Antara Ancaman dan Peluang”*, Epicentrum Walk 7th Floor B-717, Jakarta.

Dikdik Mohamad Sodik, 2016, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Cetakan Ketiga (Edisi Revisi), Refika Aditama, Bandung.

Hasjim Djalal, 1979, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Cetakan Pertama, Binacipta, Bandung.

I Wayan Parthiana, 2014, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Penerbit Yrama Widya, Bandung.

Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Yogyakarta.

Kresno Buntoro, 2014, *“Lintas Navigasi di Nusantara Indonesia”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mochtar Kusumaatmadja, 1978, *Hukum Laut Internasional*, Binacipta, Bandung.

Mohd Nizam Basiron dan Amir Dastan, 2006, *Building a Comprehensive Security Environment in the Straits of Malacca*, MIMA, Kuala Lumpur.

Oliver J. Littigen, 1985, *Hukum internasional Kini dan Esok*, Penerbit CV. Kasnendra Suminar, Surabaya.

R. Wirjono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Cetakan Kesembilan, Penerbit Sumur Bandung, Bandung.

Sulaiman Nitiatma, 1995, *Hukum Internasional Teritorialitas*, Penerbit CV. Indriajaya, Semarang.

T. May Rudy, 2001, *Hukum Internasional 2*, Refika Aditama, Bandung.

KONVENSI INTERNASIONAL

United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982

Convention on The International Maritime Organizations 1948

JURNAL

Muhammad Nasir, 2013, Pentingnya Pembentukan Undang-Undang Lintas Transit di Selat Malaka Bagi Indonesia dan Malaysia dalam *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 42, Nomor 4, Oktober 2013, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe Aceh.

Nadia Nurani Isfarin, 2012, Perlindungan Lingkungan Laut Selat Malaka dari Pencemaran Minyak Lintas Batas dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 Nomor 2 September 2012, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wisnu Yudha AR, 2007, "Reklamasi Singapura Sebagai Potensi Konflik Delimitasi Perbatasan Wilayah

Indonesia-Singapura dalam *Jurnal Global 4 Strategis*, Vol. 1 Nomor 2 Juli-Desember 2007, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya.

Yoshi Iskandar, 2013, *Istilah Hukum* dalam *Jurnal Opinio Juris*, Vol. 12 Januari-April 2013, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

NON PUBLIKASI

Memorandum of Understanding Regarding A Joint Hydrographic Survey And The Establishment And Marking of A 23-Meter Depth Navigable Channel At The One-Fathom Bank Area In The Straits of Malacca and Singapore, 1978 dalam <https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=TRI-1978-0006.pdf> diakses 13 November 2019 pukul 13.09 WIB.

Memorandum of Understanding Between The Governments of Indonesia, Malaysia, and Singapore on The One Part and The Malacca Strait Council For And On Behalf Of The Japanese Non Governmental Associations On The Other Part For The Establishment and Operation Of A Revolving Fund to Combat Oil Pollution From Ships In The Straits of Malacca and Singapore, 1981 dalam <https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=TRI-1981-0008.pdf> diakses 13 November 2019 pukul 13.06 WIB.

TESIS

Steven Yohanes Pailah, 2008, *Pengelolaan Isu-Isu Keamanan di Selat Malaka Periode 2005-2006*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta.

PERATURAN UNDANGAN

PERUNDANG-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Amendments to The Convention on The International Maritime Organization*

PUTUSAN PENGADILAN

International Tribunal for The Law of The Sea, Case No. 12: “*Case Concerning Land Reclamation by Singapore In and Around the Straits of Johor (Malaysia v. Singapore), Provisional Measures*” dalam <https://www.itlos.org/cases/list-of-cases/case-no-12/#c390>

International Tribunal for The Law of The Sea, “*Joint Declaration of Judges Ad Hoc Hossain And Oxman*” dalam https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_12/12_order_081003_joint_dec_Hossain_Oxman_en.pdf

INTERNET/ WEBSITE

A Singapore Government Agency Website, “*Housing and Development Board*” dalam <https://www.hdb.gov.sg/cs/infoweb/homepage> diakses 25 Oktober 2019 pukul 01.04 WIB.

Cosmopolitikos.com, 2008, *Montevideo Convention On Rights and Duties of States* dalam <http://krd-blog.de/wp-content/uploads/2015/01/montevideo.pdf> diakses 31 Oktober 2019 pukul 01.10 WIB.

International Maritime Organization, “*Convention on The International Maritime Organizations*” dalam <http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/Convention-on-the-International-Maritime->

[Organization.aspx](#) diakses 19 Oktober 2019 pukul 17.17 WIB.

Kantor Berita Politik Republik Merdeka, 2018, “*Menyoroti Reklamasi, Singapura Makin Kaya, Indonesia Makin Sengsara*” dalam <https://dunia.rmol.id/read/2018/11/26/368086/menyoroti-reklamasi-singapura-makin-kaya-indonesia-makin-sengsara> diakses 17 Oktober 2019 pukul 22.15 WIB.

Lily Rusna Fajriah, 2017, “*Singapura Bisa Jadi Contoh Kesuksesan Reklamasi*” dalam <https://ekbis.sindonews.com/read/1198055/34/singapura-bisa-jadi-contoh-kesuksesan-reklamasi-1492496232> diakses 17 Oktober 2019 pukul 22.01 WIB.

Lim Tin Seng, 2017, “*Land From Sand: Singapore’s Reclamation Story*” dalam <http://www.nlb.gov.sg/biblioasia/2017/04/04/land-from-sand-singapores-reclamation-story/> diakses 26 Oktober 2019 pukul 15.30 WIB.

Rosiana Haryanti, 2019, “*Menyoal Istilah Pantai dan Pulau Reklamasi*” dalam <https://properti.kompas.com/read/2019/06/24/180540521/menyoal-istilah-pantai-dan-pulau-reklamasi?page=all> diakses 27 Agustus 2019 pukul 23.03 WIB.

Shun Kwang, “*Perkembangan Hukum Laut Internasional*” dalam https://www.academia.edu/7379620/Perkembangan_Hukum_Laut_Internasional diakses 2 November 2019 pukul 22.54 WIB.

KAMUS

Bryan A. Garner, 2007, *Black Law’s Dictionary*, Thomson West, United States of America.